



Analisis Potensial Tiongkok Untuk Menjadi Negara Hegemon di Kawasan Asia Timur Melalui Strategi *One Belt One Road*

Fathin Nisa Muthia Harahap

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

This research seeks to know the potential of China to become a hegemonic country in East Asian region through the One Belt One Road strategy that initiated by China. This research uses the theory of offensive realism and the concept of hegemony to explain about China OBOR and China Foreign Policy. So based on this, the result of this study show that through the OBOR strategy that known as the Xi Jinping main Foreign Policy, China can improve the country's economy and military expenditure, which is that two main aspect is the reason why state become a hegemonic country. So, that one of the requirement of the existing hegemon state in the hegemony concept has been fulfilled by China by improving their economic and military growth. And some response from neighboring China in East Asia region indicate that there are hegemony efforts that have been carried out by China through its OBOR strategy.

Keywords: *One Belt One Road (OBOR), China, Offensive Realism, Hegemony, East Asia*

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya abad ke-21 keterbukaan Tiongkok pada dunia internasional semakin menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Tiongkok yang ekspansif dan hegemonik. perkembangan ekonomi Tiongkok merupakan hal menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut secara khusus tercermin dari kebutuhan Tiongkok akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai penanda kebangkitannya. Pasca pemerintahan Mao Zedong, Tiongkok mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerjasama internasional, lalu dilanjutkan lagi pada pemerintahan Deng Xioping yang semakin lama semakin longgar, terutama dalam hal merekonstruksi krisis ekonomi yang disebabkan oleh isolasi perdagangan yang terjadi pada masa Mao Zedong (Ayu Putu Eva Wishanti, 2016). Hu Jintao ketika menjabat menjadi Presiden Tiongkok mencanangkan *The Peaceful Rise of China* yang mana berarti kebangkitan Tiongkok akan damai menurutnya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut salah satu program kerjasama yang diluncurkan Tiongkok adalah strategi *One Belt One Road* atau dikenal dengan sebutan "OBOR". tujuan Tiongkok melalui startegi ini adalah untuk membangun kerjasama dengan berbagai negara yang ada di Asia, Afrika dan Eropa dengan membangun berbagai infrastruktur untuk memperlancar jalur perdagangan antar tiga benua tersebut (Dewi & Akbar, 2017)

Strategi OBOR telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2015. OBOR juga erat kaitannya dengan pembangunan pasar baru, peningkatan investasi keluar, penghapusan kelebihan kapasitas, revitalisasi ekonomi regional, promosi diplomasi lingkungan dan lain-lain. Dalam kebijakan OBOR ini terdapat kepentingan ekonomi Tiongkok dengan melakukan

berbagai kerjasama untuk menjalin hubungan negaranya dengan negara lain untuk menjamin akses pasar dan sumber daya guna semakin meningkatkan kekuatannya. Disatu sisi, kepentingan ekonomi merupakan kepentingan utama Tiongkok, namun kepentingan politik juga menjadi perhatiannya. Saat ini Tiongkok melihat Asia sebagai saluran strategis untuk merangkul masyarakat internasional, baik secara multilateral, sub-regional, maupun bilateral. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok ternyata menimbulkan respon dari negara-negara tetangga Tiongkok di kawasan Asia Timur, sebagaimana tersirat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 *Spectrum of East Asia's Responses to the Rise of China*



Sumber: Chung, 2014.

Dalam gambar diatas tersirat bahwa kebangkitan Tiongkok memicu respon dari negara-negara lain, khususnya negara-negara di kawasan Asia Timur. Anak panah kiri menunjukkan proporsi bahwa sikap negara-negara yang diterangkan dalam figur cenderung mengikuti alur kebijakan Tiongkok sedangkan anak panah kanan menunjukkan negara-negara ingin menyamaratakan posisinya dengan Tiongkok. Mengacu pada figur diatas, bagian anak panah kiri menunjukkan bahwa Korea Utara kurang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Tiongkok dan masuk dalam kategori *bandwagoners*. Selanjutnya, Korea Selatan masuk kedalam kategori *active hedgers* yang mana berupaya untuk menyeimbangkan antara Washington dan Beijing. Berbeda dengan Korea Utara dan Korea Selatan, Jepang dan Taiwan berusaha untuk membatasi kebangkitan Tiongkok dengan cara bekerjasama dan hal ini termasuk dalam kategori *balancers* (Chung, 2014)

Penelitian ini akan menggunakan teori realisme ofensif dan konsep hegemoni untuk menganalisis apakah Tiongkok memungkinkan untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur. Realisme ofensif berpandangan bahwa tujuan negara bukan untuk mempertahankan status quo melainkan untuk menjadi yang terkuat dalam sistem internasional. dalam teori realisme ofensif Mearsheimer mengatakan bahwa tujuan utama negara adalah untuk menjadi yang terkuat, teori ini juga menekankan efek dari struktur internasional yang anarki sehingga negara akan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan berhubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai posisi keamanan yang lebih besar (Zhang, 2016). Realisme ofensif meyakini bahwa tidak ada negara yang dapat memastikan bahwa negara lain tidak akan menggunakan kemampuan militer ofensifnya untuk menyerang negara lainnya, oleh karena hal tersebut negara harus menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. salah satu cara untuk menjamin kelangsungan hidup sebuah negara adalah dengan menjadi *Great Power* yang mana *Great Power* sendiri diartikan sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam beberapa aspek yang menyebabkan *Great Power* memiliki potensi untuk mendominasi aspek yang ia kuasai. *Great Power* akan selalu merasa curiga dan takut jika akan ada serangan yang terjadi padanya. Dari salah satu perspektif *Great Power*, *Great Power* lainnya akan berpotensi menjadi musuh (Mearsheimer, 2001). Dalam pandangan Mearsheimer ia mengatakan bahwa terdapat dua jenis hegemon dalam sistem internasional, yakni *Global Hegemon* dan *Regional Hegemon*. Mearsheimer meyakini bahwa hampir tidak ada *Global*

Hegemon kecuali terdapat sebuah negara yang telah memperoleh keunggulan nuklir yang jelas dan keunggulan tersebut di definisikan sebagai kemampuan untuk menghancurkan saingannya. Sedangkan, *Regional Hegemon* di definisikan sebagai negara yang paling kuat dalam sistem regional dan memiliki sarana untuk menjalankan dominasi pada sistemnya yang merupakan jaminan terbaik untuk tetap bertahan hidup dalam anarki internasional (Mearsheimer, 2007).

Lalu konsep hegemoni juga digunakan dalam penelitian ini. Konsep hegemoni sendiri meyakini terdapat dua kekuatan yang menjadi acuan dalam melancarkan upaya hegemoni oleh sebuah negara. kekuatan tersebut disebut dengan kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung. Kekuatan langsung sendiri diartikan sebagai, usaha negara hegemon dengan cara menyajikan aspek-aspek dari kemampuan hegemon untuk memengaruhi aktor agar mencapai hasil yang diinginkan hegemon. Kekuatan langsung mengacu pada penggunaan militer untuk menempatkan kekuatan koersif atau menggunakan sumber daya ekonomi untuk mendapatkan dan memperkaya senjata militernya. lalu, kekuatan tidak langsung tidak dapat diukur karena ia berbentuk seperti kemampuan untuk menarik aktor dengan menggunakan ide-ide yang disajikan oleh hegemon dan ide-ide tersebut dapat berubah menjadi preferensi semua orang. Kekuatan tidak langsung ini dapat diartikan dengan adanya usaha-usaha dan kerjasama yang ditawarkan oleh negara hegemon untuk menarik negara lain (Ikenbery & Kupchan, 1990).

Argumen utama dari penelitian ini adalah, strategi OBOR yang dilakukan oleh Tiongkok menyebabkan Tiongkok akan berpotensi menjadi negara hegemon di Asia Timur. Dan dalam proses menjadi hegemon Tiongkok menggunakan dua kekuatan yang ada dalam konsep hegemoni yakni kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung. Kekuatan ini berkaitan dengan peningkatan dalam bidang ekonomi dan militer yang dilakukan melalui skema OBOR yang menjadi kedok agar Tiongkok dapat menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur.

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan metode ilmiah yang melibatkan, mengamati dan menggambarkan perilaku subjek tanpa mempengaruhinya dengan cara apapun. Penelitian ini menambahkan analisis dengan alat teori atau kerangka pemikiran dari hasil mengamati peristiwa yang terjadi. Penelitian ini akan menganalisis masalah sejak dimulainya diskusi mengenai OBOR di Beijing pada tahun 2015 hingga 2018. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal, hasil berita maupun situs-situs internet relevan dan kredibel.

PEMBAHASAN

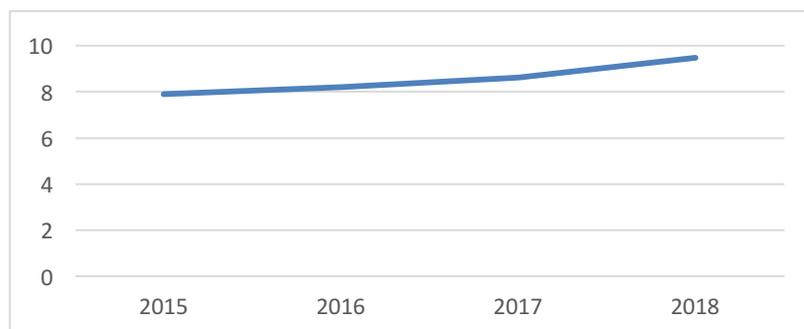
Pada akhir 2013, presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan salah satu Kebijakan luar negeri Tiongkok yang sangat ambisius dan beberapa inisiatif di bidang ekonomi. Xi Jinping menyebut kebijakan ini sebagai *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road* atau yang biasa di kenal dengan sebutan *One Belt, One Road* atau yang disingkat dengan (OBOR) yang kemudian dikenal dengan *Belt Road Initiative* (BRI). Dalam melaksanakan kebijakan OBOR ini Xi Jinping memiliki visi untuk menghubungkan wilayah perbatasan Tiongkok yang kurang berkembang dengan negara tetangga Tiongkok. OBOR dapat dikatakan sebagai salah satu rencana pembangunan terbesar di dalam sejarah modern (Cai, 2017 : 2). Tiongkok secara tradisional memandang negara tetangga di Kawasan Asia Timur sebagai negara paling penting dalam melangsungkan kebijakan luar negeri nya. Negara-negara yang berada di Kawasan Asia Timur adalah negara-negara yang memiliki hubungan anak sungai dengan Tiongkok pada masa Dinasti Qing dan sebelumnya. Hal ini menyebabkan budaya Tiongkok sangat memengaruhi kawasan Asia Timur. Budaya Jepang secara substansial berasal dari Dinasti Tang Tiongkok, begitupun dengan Korea seni dan agama yang berkembang di Korea sangat dipengaruhi oleh seni dan agama Tiongkok. Jepang dan Korea keduanya menggunakan karakter huruf Tiongkok untuk menulis bahasa mereka selama berabad-abad, dan Jepang masih melakukannya hingga saat ini (Bader, 2005).

Hubungan luar negeri pertama yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan Taiwan, setelah hampir 4 dekade tidak memiliki kontak dengan Tiongkok, Taiwan kembali melihat Tiongkok sebagai saluran strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi negaranya. pengusaha di Taiwan melihat bahwa adanya peluang besar dalam sektor tekstil, alas kaki, koper dan barang-barang industry ringan padat karya di Tiongkok. Tidak hanya dengan Taiwan, Tiongkok juga mulai di jangkau oleh Jepang. Perdana Menteri Jepang Kaifu yang berkunjung ke Tiongkok pada tahun 1991 menjelaskan bahwa Jepang tidak ingin melihat Tiongkok terisolasi dan Jepang berusaha untuk melayani Tiongkok dan menjembatani hubungan Tiongkok dengan AS pada saat itu. Selain itu,, Tiongkok menjatuhkan penentangannya terhadap Korea Selatan di Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1991 dan pada tahun 1992 hubungan Tiongkok dengan Korea Selatan melunak dan pada akhirnya menjalin hubungan diplomatik. Pada saat itu, Tiongkok menggunakan negara tetangganya dikawasan Asia Timur sebagai pelindung nilai terhadap isolasi yang dilakukan oleh barat. Para negara tetangga Tiongkok pada akhirnya memanfaatkan peluang ekonomi di Tiongkok yang mana saluran ini tidak dimanfaatkan oleh negara-negara barat. Hal ini yang menjadi landasan penting dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya dikawasan Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir yang bersifat ekonomi dan politik (Bader, 2005).

Saat ini Tiongkok adalah negara dagang terkemuka dengan perdagangan jarak jauh yang dapat menjangkau sebagian besar kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Inovasi dalam berbagai bidang industri menyebabkan posisi global Tiongkok menjadi dominan dalam bidang teknologi, navigasi dan pasar. Modernisasi yang terjadi di Tiongkok menyebabkan terjadinya pertumbuhan berkelanjutan Tiongkok di sektor manufakturnya yang juga disebabkan dari hasil investasi publik yang sangat terkonsentrasi, keuntungan tinggi, inovasi teknologi dan pasar domestic yang dilindungi. Strategi ekspor dalam rezim Xi Jinping yang dinamis menyebabkan surplus perdagangan yang sangat besar yang akhirnya menjadikan Tiongkok sebagai salah satu kreditor terbesar di dunia. Untuk mempertahankan industrinya yang dinamis, Tiongkok tentunya membutuhkan pemasukan bahan baku dalam jumlah yang besar yang akan menghasilkan investasi luar negeri dalam skala besar. Peningkatan kekuatan ekonomi Tiongkok di dunia didasarkan pada kapasitas produktif perdagangan dan investasi yang diatur oleh kebijakan tanpa campur yang ketat dalam hubungan internal mitra dagangnya. Ekonomi Tiongkok telah tumbuh sekitar 9% setiap tahunnya dan barang serta layanannya meningkat pesat dalam kualitas dan nilai (Petras, 2012).

Berikut adalah grafik peningkatan ekonomi Tiongkok mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018:

Grafik 2.1 *China Gross National Income* (dalam US\$)

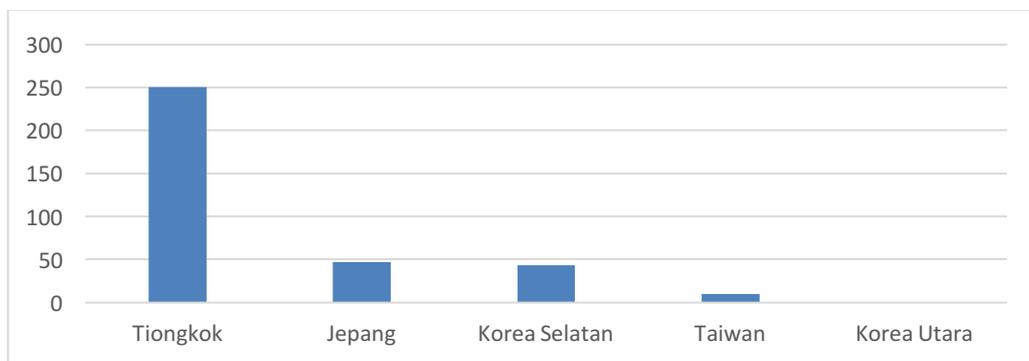


Sumber : *World Bank, 2018, Hal 1.*

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, kemampuan Tiongkok dalam bidang militer juga meningkat cukup signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir Tiongkok telah secara signifikan mengintensifkan modernisasi militer dengan menambah jumlah perenjaatan

dan peralatan militer. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mereformasi militer mereka melalui sistem pendidikan dan melakukan operasi angkatan laut militer di Teluk Aden dan juga meningkatkan kontribusinya pada misi penjaga perdamaian. Namun, kekhawatiran negara-negara lainnya telah meningkat sejalan dengan kebangkitan militer Tiongkok, terutama karena peningkatan ini tergolong cepat dan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Sejak tahun 2012 Tiongkok telah menjadi negara ekonomi adidaya sehingga mampu untuk menambah kekuatan militer yang dapat berkembang menjadi sangat berbahaya. Negara-negara yang memiliki masalah sengketa wilayah dengan Tiongkok juga menilai kemampuan militer Tiongkok sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional mereka. Sebagai hasilnya, saat ini perlombaan senjata telah terjadi dikawasan tersebut. Jepang dan Korea Selatan secara signifikan meningkatkan pengeluaran di aspek pertahanan karena hubungan mereka yang cukup tegang dengan Tiongkok. Saat ini Tiongkok telah menjadi negara dengan pembelaan anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah AS, atau dengan kata lain negara dengan pengeluaran militer tertinggi di Asia Timur, sebagaimana yang terdapat dalam grafik berikut (Vanaga, 2014 : 2).

Grafik 2.2 Lima Negara dengan Pengeluaran Militer Terbesar di Asia Timur Tahun 2018



Sumber: Duffin, 2019, Hal 1.

Kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) merupakan salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Tiongkok pada akhir tahun 2013. Bagi Tiongkok OBOR merupakan rencana untuk membangun kembali jalur ekonomi Tiongkok baik melalui darat maupun melalui laut. Kebijakan OBOR ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan interaksi ekonomi antar benua Asia, Eropa dan Afrika. Ketikan nantinya kebijakan OBOR ini telah selesai, kedua rute perdagangan akan melintasi daerah yang merupakan rumah bagi hampir dua pertiga populasi dunia dan menghasilkan hampir sepertiga Produk Domestik Bruto dunia. Selain berfokus pada tujuan internasional, kebijakan OBOR juga memiliki fokus domestik yang signifikan. Tiongkok percaya bahwa membuka jalur perdagangan ke pasar baru melalui kebijakan OBOR akan menopang pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam jangka waktu yang lama di masa yang akan datang. Sementara itu, kebijakan OBOR juga dapat meningkatkan standar hidup sebagian besar penduduk Tiongkok (Ferdinand, 2016 : 950).

Strategi OBOR juga memiliki tujuan domestik penting lainnya, salah satunya adalah untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang ada di antara berbagai provinsi di Tiongkok. Provinsi-provinsi di Tiongkok bagian Tengah dan Barat yang telah ditinggalkan oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Tiongkok sejak dibukanya perekonomian Tiongkok secara global pada tahun 1970-an. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara provinsi – provinsi di Tiongkok adalah tujuan penting bagi Beijing karena telah dipahami bahwa keuntungan ekonomi yang akan dihasilkan oleh strategi OBOR akan membantu memerangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam hal ini sangat terlihat jelas bahwa kebijakan OBOR merupakan platform kebijakan luar negeri utama Presiden Xi Jinping yang tidak hanya memiliki tujuan terhadap dunia internasional namun juga memiliki tujuan domestik yang

signifikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi negara. strategi OBOR adalah sebuah inisiatif kontemporer yang dirancang untuk memastikan kemakmuran dan pertumbuhan Tiongkok di masa depan, strategi ini sangat berkaitan erat dengan sejarah panjang jalur Sutra Maritim (Robbins, 2017).

Dalam gambar 2.2 dibawah ini, terdapat rute Jalur OBOR yang menghubungkan Tiongkok di benua Asia Timur hingga ke Benua Eropa. Jalur OBOR yang berwarna biru menunjukkan rute *Silk Road Economic Belt* dan Jalur OBOR yang berwarna kuning menunjukkan rute *21st Century Maritime Silk Road*.

Gambar 2.1 *Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road Map*



Sumber : Cai, 2017, Hal 1

Saat ini cakupan wilayah OBOR terus berkembang, Tiongkok juga mengisyaratkan niatnya untuk memperluas jalur OBOR ke Amerika Latin. Melalui lingkup OBOR yang semakin global menggarisbawahi bahwa Tiongkok menggunakan strategi ini sebagai sarana untuk membingkai dan memasarkan kebijakan luar negerinya secara keseluruhan. Saat ini jalur OBOR juga tidak terbatas pada tujuan ekonomi. Visi kerjasama maritim yang dibangun Tiongkok juga menyoroti salah satu kerjasama lainnya, yakni mengenai masalah keamanan yang menjadi salah satu prioritas kerjasama Tiongkok. Hal ini didasarkan pada investasi Tiongkok yang meningkat dan komunitas ekspatriat Tiongkok yang tumbuh di negara-negara yang rawan risiko. Dikarenakan hal tersebut, Tiongkok merasa perlu untuk mengambil tindakan atas masalah keamanan yang terjadi di sepanjang jalur OBOR. Pada tahun 2015, Tiongkok mulai membuka pangkalan militer luar negerinya di Djibouti, sebuah pusat dari jalur OBOR. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mulai mempromosikan kemampuannya berupa teknologi, penegakan hukum dan militernya ke negara-negara yang dicakup oleh jalur OBOR dalam masalah-masalah terkait keamanan seperti navigasi satelit, manajemen bencana dan strategi memerangi kejahatan (merics, 2018).

Pada saat sebelum adanya strategi OBOR, Tiongkok sebenarnya sudah melakukan kerjasama perdagangan pada masa kedinastian. Namun, kerjasama perdagangan yang dilakukan Tiongkok pada masa itu tidak bersifat hegemonik dan belum memiliki tendensi untuk menjadi negara hegemon dan menjadi *Great Power*, berbeda dengan saat ini, pemerintah Tiongkok yang kembali menggunakan Jalur Sutra sebagai jalan baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Karena strategi ini memiliki tujuan yang tidak hanya akan mempercepat sirkulasi produk, tetapi juga dapat meningkatkan inovasi dan kerjasama

antar masyarakat. Jalur Sutra yang digunakan Tiongkok pada pemerintahan Presiden Xi Jinping saat ini dikemas dalam sebuah strategi yang diberi nama strategi *One Belt One Road* (OBOR). Strategi ini menjadi awal baru bagi Tiongkok untuk memajukan kesejahteraan negaranya dan dapat mengembangkan perekonomiannya baik untuk dalam negeri Tiongkok sendiri maupun untuk urusan luar negeri Tiongkok.

Selanjutnya, dimulai pada abad ke-21 di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok telah mengeluarkan sebuah strategi yang sangat berdampak besar bagi kemajuan Tiongkok. Strategi ini disebut sebagai Jalur Sutra Baru yang dinamakan dengan strategi *One Belt One Road* atau *Belt Road Initiative* atau yang biasa dikenal dengan OBOR. Strategi ini difokuskan pada upaya dalam mengatasi kesenjangan regional melalui kombinasi langkah-langkah ekonomi dan pekerjaan infrastruktur termasuk pembangunan kereta api, jalan, jaringan pipa, pelabuhan dan pusat logistik untuk mengurangi beban biaya arus barang yang biasanya transit di berbagai negara. Saat ini sudah lebih dari 60 negara yang terlibat dalam kerjasama OBOR dan mencakup 70 persen dari populasi dunia dengan perkiraan biaya berkisar sekitar 6 Triliun USD (Cau, 2018 : 40).

Dalam melancarkan strategi OBOR, Tiongkok telah membentuk kerangka kerja keuangan baru yang bernaung baik pada organisasi yang telah ada ataupun organisasi yang baru. Beberapa kerangka kerja keuangan tersebut dinamakan dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), *New Development Bank* (NDB), BRICS Bank yang merupakan Bank Pembangunan Tiongkok yang telah direformasi dan *Silk Road Fund* (SRF) yang bersifat *ad hoc* atau sementara. Dalam perkembangannya, salah satu lembaga investasi yang didirikan Tiongkok memicu perdebatan sengit tentang geopolitik Tiongkok. Saat ini, AIIB telah didefinisikan sebagai pesaing IMF dan sebagai alat pengendali untuk membangun tatanan dunia yang baru. Lalu dalam faktanya, hubungan Tiongkok dengan IMF selalu jauh dari kata ideal. Dalam kurun waktu yang cukup lama, IMF telah meminta Tiongkok untuk mengurangi hutang perusahaannya dan mengimplementasikan sebuah reformasi ekonomi di dalam negaranya.

Sejalan dengan teori realisme ofensif yang dikemukakan oleh Mearsheimer (2001), beliau mengatakan bahwa tujuan utama sebuah negara adalah bertahan hidup yang mana setiap negara cenderung melihat dirinya rentan dan sendirian oleh karena hal tersebut negara bertujuan untuk mengusahakan kelangsungan hidupnya sendiri. Berdasarkan teori realisme ofensif tersebut dapat dipahami bahwa, tujuan Tiongkok mendirikan AIIB dan beberapa lembaga keuangan lainnya disinyalir merupakan sebuah cara Tiongkok untuk mengusahakan kelangsungan hidupnya sendiri, lalu teori realisme ofensif juga menjelaskan bahwa negara akan cenderung membentuk aliansi untuk bekerjasama, namun hal tersebut tidak akan berlangsung lama dikarenakan realisme ofensif memandang bahwa mitra aliansi hari ini mungkin akan menjadi musuh di masa depan. Sangat jelas sekali bahwa AIIB dan beberapa lembaga keuangan lainnya yang didirikan oleh Tiongkok juga memiliki kerjasama dengan negara-negara lain. Sebagaimana diketahui bahwa dibentuknya lembaga-lembaga keuangan ini dilakukan sebagai lembaga pendanaan Tiongkok dalam melancarkan jalannya strategi OBOR. Namun, beberapa negara yang bekerjasama dengan Tiongkok melalui OBOR cenderung mengalami *Debt Trap* atau “Jebakan Hutang” yang mana pendanaan kerjasama dengan negara-negara tersebut dilakukan melalui lembaga keuangan yang didirikan sendiri oleh Tiongkok, salah satunya adalah SRF. Dikarenakan adanya jebakan hutang tersebut, pada akhirnya banyak negara-negara yang tidak lagi percaya bahwa OBOR merupakan salah satu strategi murni Tiongkok dalam kerjasama ekonomi. Sebagaimana yang diyakini oleh realisme ofensif, sifat - sifat dan upaya – upaya negara yang seperti ini merupakan salah tujuan untuk meningkatkan power negara tersebut dan Tiongkok melakukan hal ini.

Walaupun Tiongkok telah berulang kali meyakinkan dunia tentang kemurnian ruang lingkup dari OBOR yakni dengan menyatakan bahwa OBOR hanya akan berfokus pada ekonomi, seluruh inisiatif dan lembaga pendanaan yang dimilikinya yakni AIIB, SRF dan

NDB telah membawa Tiongkok pada kekuatan geopolitik dan geoekonomi. Kekuatan geopolitik Tiongkok pada dasarnya terwujud karena beberapa alasan, menurut data yang ada pada bab 2, Petras (2012) mengatakan bahwa saat ini Tiongkok merupakan negara dagang terkemuka dengan perdagangan jarak jauh yang dapat menjangkau sebagian besar kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa melalui hal ini Tiongkok dapat memberikan pembuktian dari kemampuannya untuk memanfaatkan kondisi geografisnya sebagai jalur dagang yang di implementasikan melalui strategi OBOR yang selanjutnya hal ini disebut sebagai kemampuan geopolitik.

Dalam hal lainnya, Inovasi dalam bidang industry menyebabkan posisi global Tiongkok menjadi dominan dalam bidang teknologi, navigasi dan pasar. Modernisasi yang terjadi di Tiongkok menyebabkan terjadinya pertumbuhan berkelanjutan Tiongkok di sektor manufakturnya yang juga disebabkan dari hasil investasi publik yang sangat terkonsentrasi pada keuntungan tinggi, inovasi teknologi dan pasar domestik. Hal ini lah yang dimaksud dengan geoekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok yakni dengan memanfaatkan kemampuan ekonomi dan posisi geografisnya agar mencapai tujuan negaranya. Pada dasarnya ekonomi Tiongkok disebut sebagai *Great Power* dikarenakan Tiongkok memang unggul dibidang ekonomi.

Keunggulan Tiongkok ini dapat dilihat dari upaya Tiongkok dalam membangun berbagai lembaga-lembaga baru untuk mendanai proyek infrastruktur yang dibangun OBOR, selanjutnya lembaga-lembaga baru ini mendorong adanya merger, akuisisi dan investasi lapangan hijau untuk menciptakan apa yang disebut dengan “Perusahaan Multinasional dengan Karakteristik Cina”. Proyek-proyek infrastruktur besar yang diharapkan oleh OBOR yakni akan menjanjikan untuk memberikan peningkatan besar dalam kecepatan transportasi dan telekomunikasi untuk menurunkan biaya. Tiongkok melalui OBOR ini berencana untuk mengintegrasikan Rusia, Asia Tengah dan Eropa, lalu menghubungkan Asia Selatan melalui jalur darat dan laut ke pasar dan sumber daya alam dari negara-negara di utara dan juga Afrika. Tiongkok melalui lembaga keuangan yang dibangunnya untuk mendukung OBOR merupakan sebuah bentuk geoekonomi yang dilakukan Tiongkok terhadap negara-negara mitra kerjasamanya, karena mau tidak mau negara mitra kerjasama OBOR harus patuh terhadap pinjaman yang diberikan melalui lembaga keuangan yang dibangun oleh Tiongkok tersebut (Freeman, 2018).

Selanjutnya, beberapa kekuatan yang menjadi dasar geopolitik dan geoekonomi Tiongkok akan mewujudkan niat dari Tiongkok, karena efek dari strategi dan kebijakan yang dilakukannya secara otomatis dihasilkan ketika meluasnya relevansi geografis dan ekonomi dari strategi OBOR. Tiongkok tentu akan mendapatkan pengikut baru dan mendorong negara dan pemimpin yang bermitra untuk memasukkan poin-poin OBOR dalam proses pengambilan keputusan di dalam hubungan luar negeri dan dalam negeri mereka (Cau, 2018 : 61-63).

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran realisme ofensif dan konsep hegemoni untuk menganalisis potensi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur. Peneliti berhasil menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Peneliti menemukan bahwa melalui OBOR nya Tiongkok berpotensi untuk menjadi negara hegemon di Asia Timur dikarenakan OBOR pada akhirnya membawa Tiongkok menjadi negara *Great Power* dalam bidang ekonomi, yang mana melalui hal tersebut Tiongkok juga akan mampu meningkatkan kekuatan militernya yang sebagaimana diketahui dan diyakini oleh konsep hegemoni bahwa kekuatan militer dan ekonomi merupakan dua hal yang sangat penting untuk mencapai hegemoni.

REFERENSI

- Ayu Putu Eva Wishanti, D. (2016). Kebangkitan China dalam Kerjasama Ekonomi Internasional di Kawasan Asia Timur, 1–2. Retrieved from file:///C:/Users/Asus PC/Downloads/4-116-1-PB (1).pdf
- Bader, J. A. (2005). China's Role in East Asia: Now and the Future. Retrieved from <https://www.brookings.edu/on-the-record/chinas-role-in-east-asia-now-and-the-future/>
- Cai, P. (2017). Understanding China's Belt and Road Initiative. *Lowy Institute For International Policy*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative>
- Cau, E. (2018). Geopolitical Implications of the Belt and Road Initiative: The Backbone for a New World Order. *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, 4(1), 39–105.
- Chung, J. H. (2014). East Asia Responds to the Rise of China : Patterns and Variations All use subject to JSTOR Terms and Conditions to the Rise of East Asia Responds China : Patterns and Variations *. *Pacific Affarirs*, 82(4), 657–675.
- Dewi, N. P. S. P., & Akbar, H. (2017). Kebijakan The New Silk Road Cina di Bawah Pemerintahan Xi Jinping. *Eprints.u[Pnyk*, 1–2.
- Duffin, E. (2019). Countries with the highest military spending in 2018. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending/>
- Ferdinand, P. (2016). Westward ho-the China dream and one belt, one road: Chinese foreign policy under Xi Jinping. Retrieved from <https://www.e-ir.info/2017/03/26/one-belt-one-road-and-the-history-of-the-maritime-silk-route/>
- Freeman, C. W. (2018). The Geoeconomics Implications of China Belt and Road Initiative.
- Ikenbery, G. J., & Kupchan, C. (1990). International Organization: Socialization and Hegemonic Power.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. London: W.W Norton Company.
- Mearsheimer, J. J. (2007). *International Relations Theory: Dicipline and Diversity*. Oxford University Press.
- meric. (2018). Mapping the Belt and Road Initiative: this is where we stand. Retrieved September 9, 2019, from <https://www.merics.org/en/bri-tracker/mapping-the-belt-and-road-initiative>
- Petras, J. (2012). China: Rise, Fall and Re-Emergence as a Global Power. Retrieved from <https://www.globalresearch.ca/china-rise-fall-and-re-emergence-as-a-global-power-2/29644>
- Robbins, B. (2017). One Belt, One Road and the History of the Maritime Silk Road. Retrieved September 5, 2019, from <https://www.e-ir.info/2017/03/26/one-belt-one-road-and-the-history-of-the-maritime-silk-route/>
- Vanaga, N. (2014). *China's Military Rise: The Lack of Transperancy and Internal Political Uncertainty*. Retrieved from https://www.naa.mil.lv/sites/naa/files/document/12_SA-8-China.pdf
- World Bank, T. (2018). World Bank national accounts data: GNI per capita, Atlas method (current US\$)- China.
- Zhang, B. (2016). Xi Jinping, “Pragmatic” Offensive Realism and China's Rise. *Global Asia*.